

RINGKASAN

INTERNASIONALISASI MASALAH PAPUA

Oleh: Baiq L.S.W. Wardhani
Tahun 2006
Jumlah Halaman 47

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Nomor Kontrak: 615/J03.2/PG/2006
Tanggal 7 Juni 2006

Internasionalisasi konflik adalah sebuah proses, baik yang disengaja maupun tidak, yang menyebabkan pihak luar terlibat dalam konflik internal yang terjadi di dalam batas teritorial suatu negara. Konflik domestik bisa menjadi konflik internasional apabila konflik tersebut memiliki dimensi internasional. Meluasnya konflik internal menjadi internasional merupakan konsekuensi dari turut campurnya pihak asing di dalam konflik internal tersebut.

Bagi pihak pemberontak, internasionalisasi menjadi sesuatu yang signifikan bagi berhasilnya tujuan yang hendak dicapai. Hal ini menjadi lebih penting lagi bagi pemberontak pemisahan diri. Perjuangan untuk melepaskan diri dari negara induk hampir tidak mungkin terjadi jika pihak luar tidak memberikan dukungan. Bentuk dukungan yang berasal dari luar dapat berbentuk uang, tempat tinggal yang aman, persenjataan, pelatihan perang maupun administrasi, dukungan moral, maupun dukungan logistik. Dukungan luar tersebut sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan gerakan pemisahan diri.

Untuk mencapai tujuan kemerdekaannya, pejuang/aktivis kemerdekaan Papua perlu mendapatkan dukungan dari pihak asing/luar negeri. Para aktivis Papua aktif melakukan pendekatan kepada beberapa pihak asing yang bersimpati terhadap perjuangan mereka. Pada umumnya dukungan berasal dari kelompok/aktor bukan negara (*non-state actor*). Sejauh ini dukungan diperoleh dari beberapa kelompok di Pasifik Selatan (Pasifik Barat Daya), Australia, Selandia Baru dan beberapa kelompok di Eropa, Afrika dan Amerika. Secara kualitatif dukungan asing tersebut relatif kecil. Namun sekecil apa pun dukungan asing memiliki arti penting bagi perjuangan pemisahan diri. Untuk menambah dukungan asing, para aktivis perjuangan Papua merdeka, dengan berbagai kendala yang dihadapi, secara aktif dan terus menerus berupaya mencari dukungan tersebut.

Bagi pemerintah Indonesia, upaya melepaskan diri rakyat Papua merupakan ancaman mendasar bagi keutuhan wilayah RI. Untuk itu pemerintah RI pun dengan segala cara berupaya untuk menghentikan segala langkah para aktivis Papua. Langkah yang diambil oleh Pemerintah RI berupa operasi militer maupun diplomasi. Perubahan pendekatan ini disebabkan karena berubahnya taktik yang digunakan oleh OPM, dari perang gerilya menjadi diplomasi.

Jika sebelumnya pemerintah RI kurang menjalin hubungan baik dengan negara-negara Pasifik Barat Daya, mulai tahun 2000-an pemerintah berupaya memperbaiki "kesalahan" tersebut. Negara-negara di kawasan ini memiliki ikatan emosional dengan rakyat Papua. Hal ini dapat dilihat dari target perjuangan Papua yang menjadikan kawasan Pasifik Barat Daya sebagai wilayah utama bagi perjuangan "diplomasi" mereka. Di kawasan ini pula terdapat Australia dan Selandia Baru yang merupakan para pemain utama dan pemain regional di kawasan Pasifik Barat Daya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya RI untuk membendung upaya internasionalisasi masalah Papua di berbagai penjuru dunia relatif berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tiadanya dukungan resmi yang diberikan oleh negara terhadap perjuangan kemerdekaan Papua, kecuali Vanuatu. Namun pemerintah hendaklah tidak bersikap *take it for granted* atas dukungan tersebut. Pemerintah selayaknya bersikap waspada karena "virus Vanuatu" mungkin saja dapat terjadi, terutama di kalangan negara-negara Pasifik Barat Daya yang rentan terhadap pengaruh asing.



SUMMARY

THE INTERNATIONALISATION OF PAPUAN SECESSIONISM

By: Baiq L.S.W.Wardhani
Year 2006
47 pages

International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Contract no. 615/J03.2/PG/2006
Date June 7th, 2006

Internationalisation of internal conflict can be defined as a process, intendedly or unintendedly, spread across borders. It begins when outside players involve in the conflict. For the insurgent, internationalisation of conflict is a significant ingredient to the successful of their struggle. Outside support can be given in the form of money, safe havens, military equipment, military training and organisational skills, moral, logistic, and diplomatics.

Throughout her presidency, Megawati struggled to find a balance of domestic and foreign policies that would allow for the successful management of separatist tensions. The relatively small number of native Papuans meant that unless the OPM could cultivate support among settlers from other islands (an unlikely prospect) it was never going to constitute more than a tiny but troublesome irritation for TNI.

Added to this, her tenure as President was marked by a comparatively low level of separatist violence in Papua. Although technically still involved in a guerilla-based secessionist struggle, this period marked a shift in OPM tactics whereby they sought to complement violence with diplomacy in the pursuit of independence. Support for this tactical shift came to the fore during the Gus Dur presidency, although it was Megawati who was its ultimate beneficiary.

Indonesia's relations with countries in the Southwest Pacific have traditionally been limited. However, it is also true that particularly since the end of the New Order, these relations had improved markedly. To this end, Jakarta elevated the region to that of a second tier priority, after only ASEAN, in its foreign policy. However, the move was transparently self-interested with very few visits to Pacific.

Although support for the Papuan secessionism is relatively small, Jakarta cannot take it for granted. The so called "Vanuatu virus" could have been spread throughout the Pacific Island countries, especially when many groups of people in Australia and New Zealand lend their support for the independence of Papua.

v

INTERNASIONALISASI MASALAH PAPUA

Baiq L.S.W. Wardhani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga
7 Juni 2006

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya internasionalisasi dilakukan oleh para aktivis Papua. Selain itu penelitian ini mencermati langkah yang diambil pemerintah RI, khususnya pemerintahan megawati Soekarnoputri untuk mengurangi upaya internasionalisasi tersebut.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui kombinasi teknik wawancara dengan para pejabat di lingkungan Departemen Luar Negeri dengan penelitian kepustakaan.

Sementara para aktivis Papua relatif berhasil dalam memperjuangkan kepentingannya di wilayah Pasifik selatan, selama masa pemerintahannya, berjuang untuk mencari keseimbangan antara kepentingan domestik dan luar negeri yang memungkinkannya untuk *me-manage* sebaik mungkin konflik separatis tersebut agar tidak membahayakan kelangsungan integritas RI. Jumlah pejuang Papua yang relatif kecil sebenarnya bukanlah menjadi ancaman bagi eksistensi nasional Indonesia maupun bagi TNI, setidaknya sampai masalah Papua mendapat dukungan yang cukup kuat dari Pasifik Selatan (yang nampaknya dukungan tersebut tidak terlalu mencemaskan).

Kata kunci: gerakan pemisahan diri, dukungan, Pasifik Selatan, kebijakan luar negeri.

THE INTERNATIONALISATION OF PAPUAN SECESSIONISM

Baiq L.S.W.Wardhani

International Relations Department
Faculty of Social and Political Sciences
Date June 7th, 2006

ABSTRACT

The research aims to overview how of Papuan secessionism has become one of fundamental problems for the unity of Indonesia. Throughout the process, the research inquiries how did the Papuan secessionist activists seek international support for the success of their cause and how did the Indonesian government, particularly under the Presidency of Megawati Sukarnoputri respond to the problem. The research employs the combination of interview with the government officials and text analysis.

While the Papuans find itself has a relatively success in the South Pacific, throughout her presidency, Megawati struggled to find a balance of domestic and foreign policies that would allow for the successful management of separatist tensions. The relatively small number of native Papuans meant that unless the OPM could cultivate support among settlers from other islands (an unlikely prospect) it was never going to constitute more than a tiny but troublesome irritation for TNI.

Keywords: secessionism, support, South Pacific, foreign policy.

